



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FERY SUMARDI
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 715497

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 570.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 115 m²/115 m² di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 92 m²/92 m² di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah Seluas 284 m² di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 271 m²/60 m² di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 607.700.000

1. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000
3. MOBIL, TOYOTA INOVA 2,4 V Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 406.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 2.600.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 408.617.346

F. HARTA LAINNYA

Rp. 210.000.000

Sub Total

Rp. 1.798.917.346

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.798.917.346



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.